

SINERGI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DI KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT DALAM ERA GLOBAL

Oleh: Abdurrahmansyah*

Abstrak: Dimensi moralitas adalah salah satu dimensi yang sangat penting dalam sistem pendidikan modern. Bahkan penjelasan ilmiah mutakhir menempatkan emotional dan spiritual intelligence sebagai aspek yang harus dikembangkan secara proporsional dalam proses pendidikan. Signifikansi pengajaran moral yang lebih ditekankan pada pendidikan budi pekerti dipandang urgen diperbincangkan karena menurut taxonomy Bloom sistem pengajaran harus mengembangkan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik sekaligus. Pendidikan budi pekerti dapat sukses dilakukan jika terdapat hubungan sinergis antara institusi keluarga, sekolah dan masyarakat. Hubungan sinergis ini mutlak diperlukan mengingat budi pekerti adalah aspek aplikatif dari pendidikan moral yang tampaknya justru terlihat di keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, sistem dan pola pengajaran budi pekerti di sekolah harus melampaui pola pengajaran teoritik dan tidak hanya sebagai proses pengalihan ilmu pengetahuan semata-mata.

Kata kunci: Pendidikan moral, budi pekerti, keluarga, sekolah, masyarakat, global.

Pendahuluan

Naisbitt dan Aburdene mengawali tulisannya mengenai kondisi abad 21 dengan kalimat, "kita berdiri pada fajar suatu dunia baru" (Naisbitt dan Aburdene: 1990: 1). Kalimat tersebut menyiratkan pemahaman bahwa ada perbedaan yang jelas pada kondisi masa kini dan akan datang dengan masa lampau. Abad 21 ditandai dengan serangkaian ledakan kekerasan yang didorong oleh perselisihan etnis, agama, budaya atau kawasan (Naisbitt: 1994: 169). Fenomena itu lebih disebabkan oleh arus informasi yang berkembang dengan cepat, sehingga suatu masyarakat seolah-olah

diperkenalkan dengan budaya luar yang berbeda, baik secara kuantitas maupun kualitas dengan budaya domestik masyarakat tertentu.

Benturan budaya yang sangat serius dan memprihatinkan, tentu akan semakin mudah terjadi, jika secara kultural masyarakat tidak memperkuat jati dirinya dengan memperkokoh eksistensi diri melalui nilai-nilai dasar yang dianutnya. Oleh karena itu, menurut Karim (1993: 93), komitmen umat Islam menghadapi era modern diarahkan pada dua hal. *Pertama*, bagaimana peradaban manusia tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual-transendental. *Kedua*, bagaimana umat Islam berperan dalam setiap gelombang perubahan, sehingga problematika sosial yang dihadapi pada masa depan dapat dilihat dari kerangka nilai-nilai agama (Salim: 1987: 47).

Mencerermati persoalan masa depan dengan *frame* agama adalah sangat relevan, sebab kemajuan masa depan tetap bersumber pada spiritualisme dalam pengertian yang murni dan utuh. Kegelisahan dan kegersangan psikologis yang dialami manusia modern adalah disebabkan tercerabutnya kehidupan spiritual dari modernisasi, sehingga mereka menderita krisis makna dan tujuan hidup (*meaning and purpose of life*) (Arifin:1996: 36).

Krisis yang terjadi pada manusia modern tidak terlepas dan lebih disebabkan landasan filsafat dan ideologi yang mereka anut lebih bemuansa pemisahan antara kebenaran dan realitas, serta antara kebenaran dan nilai spiritual transendental. Pemisahan inilah yang oleh al-Attas disebut dengan sekularisasi (*secularization*) yang benar-benar telah memisahkan diri dari dunia spiritual dan agama (al-Attas: 1996: 75).

Kondisi hidup seperti itu, menurut Toynbee seperti dikutip Nurcholish Madjid (1995: 450), sebenarnya telah dimulai menjelang akhir abad ke-15 M, dimana orang-orang Barat berterima kasih tidak lagi kepada Tuhan (*God*), tetapi kepada dirinya sendiri. Realitas kehidupan seperti ini tentu akan terus berlanjut sampai pada titik kejemuhan yang tidak dapat diprediksikan *limit* waktunya, atau menunggu suatu paradigma baru diperkenalkan dengan nilai-nilai spiritual yang oleh orang Barat diabaikan. Karena paradigma sains, ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang selama ini dikembangkan dengan berbagai pendekatan non metafisik (*empirical approach*) dan netral etik telah menyeret manusia kepada kegersangan dan kebutaan spiritual.

* Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, alumni Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan spesialisasi Pendidikan Islam

Globalisasi adalah medium yang sangat gencar disosialisasikan pada masyarakat dunia. Globalisasi menawarkan transparansi pada semua aspek kehidupan, termasuk sosial budaya. Ini bukan tidak beresiko. Percieval menggambarkan bahwa dalam bidang pendidikan, ia mengkhawatirkan anak-anak yang masih suci dipaksakan untuk menerima informasi secara vulgar, sebelum mereka menerima pendidikan formal secara wajar (Percieval: 1988: 159), yang lebih terarah dan dapat diperanggjawabkan. Kegelisahan serupa juga dikemukakan Ahmed, bahwa keberadaan media global akan berhasil mengubah karakter muslim. Jika ini terjadi berarti masyarakat Islam sedang berhadapan dengan ancaman yang tidak dapat dianggap remeh.

Fenomena tersebut dapat menimbulkan kepribadian yang tidak utuh (*split personality*), yakni munculnya gejala perilaku yang "tekun beribadah" di satu sisi, namun pada saat lain sering terjerumus ke hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas mulia. Gejala itu merupakan realitas yang dikhawatirkan para pemikir tadi. Kecenderungan maraknya gejala-gejala seperti yang digambarkan di atas, harus dipahami sebagai konsekuensi dari semakin menjauhnya pengembangan intelektual dari nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan moral dan budi pekerti memiliki arti penting dalam konstelasi pemikiran pendidikan masa depan. Konsep dan sistem pendidikan harus diformat secara komprehensif sehingga mampu menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual dan bermoral serta memiliki etika secara sosial budaya.

Tulisan ini mencoba memetakan tantangan modernisasi dalam kaitannya dengan upaya membangun basis pendidikan moral dan budi pekerti sebagai tanggungjawab keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Gaya Hidup Global dan Upaya Mempertahankan Nilai-nilai Moral

Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, istilah "*global*" mengandung makna "*embracing the whole of a group of items*" (Hornby, et al.: 1973: 423). Dengan kata lain, globalisasi bermakna suatu proses dimana sekat-sekat sektoral domestik tidak menjadi penting dalam rangka membentuk peradaban dunia yang dapat diakses oleh semua bangsa. Gejala ini dapat dirasakan pada sektor informasi yang dapat membentuk gaya hidup sebagai akumulasi dari berbagai heterogenitas

budaya dunia. Gaya hidup global ini dalam batasan tertentu akan berbenturan dengan gaya hidup yang masih terikat dengan sekat kultural domestik, yang secara tradisional dihayati oleh sebagian besar penduduk dunia terutama pada negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Karakteristik gaya hidup masyarakat global tersebut dapat melahirkan tiga kecenderungan. *Pertama*, gaya hidup global kurang memperhatikan nilai-nilai spiritual murni dari agama-agama, karena pengakuan secara sepihak terhadap suatu agama dikhawatirkan akan mengaburkan konsep budaya global, yang keberadaannya lebih tinggi dan universal dari agama formal. *Kedua*, selalu memandang sesuatu dengan kaca mata kolektivitas dan universalitas yang tidak terikat oleh salah satu konsep budaya tertentu, tetapi justru berada di atas nilai-nilai budaya yang plural. *Ketiga*, penekanan gaya hidup global terletak pada pandangan materialistik-empirik, sebab nilai-nilai empirik akan lebih menjanjikan terjadinya "toleransi" budaya dan mudah diakses ketimbang hal-hal yang transenden.

Tampaknya globalisasi sebagai benturan peradaban manusia yang terekspose secara eksternal cenderung kontras homogenitas. Dari segi budaya, globalisasi akan memperlihatkan keberagaman gaya hidup yang selalu silih berganti berusaha mencari tempat untuk menjadi *trend* masyarakat dunia. Jadi, globalisasi selalu bercirikan heterogenitas. Naisbitt menegaskan, semakin homogen gaya hidup maka semakin kokoh dan kuat ketergantungan masyarakat pada nilai-nilai yang dianggap lebih sakral, seperti agama.

Di sisi lain, gejala "kebangkitan spiritualisme" dari masyarakat modern Barat – meskipun bentuk semangat spiritualisme itu tidak mengambil bentuk formal seperti agama—bersifat semu. Menurut Burhan, realitas yang berkembang di Barat itu tidak lebih hanya sebagai medium untuk memuaskan kekeringan psikologis, obsesi, dan kebutuhan rohani sesaat, sekedar memenuhi ambisi untuk mencari ketenangan sementara. Oleh karena itu spiritualisme model ini tidak bersifat permanen, karena ia bukan menjadi tujuan utama sebagaimana yang dikehendaki oleh agama.

Spiritualisme yang berkembang di masyarakat modern akhir-akhir ini hanya berupa gejala kehidupan yang ingin kembali kepada kemerdekaan manusia yang telah mengalami reduksi dalam kehidupan modern. Salah satu jalan keluar dari ambiguitas perilaku itu adalah dengan meningkatkan

hubungan transendensi spiritual secara berkesinambungan, karena keseimbangan (*balance*) itu sesungguhnya berada pada proses tersebut. Ini menjadi poin penting kehadiran Islam dengan serangkaian dimensi esoterisnya. Islam menghadirkan sebuah konsep keseimbangan sebagai pilihan untuk menyaring perkembangan modern yang menawarkan berbagai dampak sosial.

Pembahasan mengenai upaya mempertahankan nilai-nilai moral dalam era globalisasi merupakan konsekuensi logis bahwa globalisasi tidak menutup kemungkinan membawa ruh sekularisme. Apabila proses ke arah itu terjadi, maka perlu diantisipasi dengan menyiapkan perangkat moral sebagai dimensi yang justru diabaikan dalam tatanan yang bermuansa sekuler. Globalisasi sebagai konsideran modernisasi akan menjadi kecenderungan pada masa datang dengan segala dampak yang dibawanya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana upaya mengimbangi dampak tersebut pada dimensi mempertahankan nilai-nilai moral islami. Menurut Shari'ati (1994: 29), salah satu upaya ke arah itu adalah dengan membangkitkan kesadaran umat untuk kembali ke jalan Tuhan. Keterlenaan umat terhadap pandangan peradaban modern yang menggiurkan akan menyebabkan tidak tersosialisasikannya nilai-nilai moralitas Islam. Kaum muslim perlu mengurangi sikap fanatisme terhadap globalisme, seperti kagum yang berlebihan terhadap tawaran budaya Barat yang dapat menimbulkan hasrat untuk diadopsi sebagai budaya internal secara membabi buta.

Dalam pada itu, sebaliknya kita perlu mengembangkan kultur asli dari khazanah budaya bangsa (*oriental values*) yang sarat dengan nuansa moralitas, spiritualitas dan aspek metafisis. Pada konteks keindonesiaan misalnya, kita bisa mengembangkan intensitas penghayatan nilai-nilai moral yang terakumulasi dalam simbol-simbol ideologi bangsa, Pancasila. Ini justru lebih relevan dan rasional untuk dihayati dan dikembangkan sebagai filter mengantisipasi kecenderungan global yang kering dari nilai-nilai moralitas spiritual.

Untuk lebih mencermati tawaran Shari'ati agar kita dapat membangkitkan kesadaran umat dalam rangka menuju jalan Tuhan, tentunya tidak terlepas pada tuntutan agar kita juga mencermati perkembangan arus informasi global yang semakin transparan, dan bahkan mengarah kepada pelecehan nilai-nilai moral seperti yang disajikan oleh jaringan global yang

semakin mudah diakses oleh masyarakat, seperti televisi, media cetak, dan internet sebagai kecenderungan masa depan.

Selain upaya membangkitkan kesadaran umat, hal lain yang perlu diupayakan untuk mempertahankan nilai-nilai moral islami adalah dengan lebih meningkatkan peranan pendidikan agama, terutama pada dimensi pendidikan akhlak dan budi pekerti (Nasution: 1995: 428). Upaya peningkatan peranan pendidikan agama ini melalui berbagai lembaga, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penerapan pelaksanaan pendidikan moral ini perlu terus dikontrol dan jangan cukup merasa puas apabila sudah melihat anak terampil melakukan praktik-praktik fiqih yang bersipat legalistik saja, tetapi dalam berbagai gerak dan kondisi proses pengawasan orang tua, guru dan masyarakat harus terus dilakukan secara terpadu.

Tawaran di atas agaknya lebih dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa generasi yang akan datang adalah penerus estapeta dan pewaris peradaban. Oleh karena itu, upaya mempertahankan nilai-nilai moral islami lebih diarahkan pada pewarisan nilai dan budaya kepada anak-anak dan generasi muda Islam, supaya mereka memiliki integritas akhlak (budi pekerti) yang baik. Untuk itu para pendidik dan orang tua dituntut untuk memahami hal ini secara serius.

Menurut Shihab (1995: 245), upaya mempertahankan nilai-nilai moral islami adalah dengan memahami dan menghayati nilai-nilai dalam al-Qur'an secara komprehensif. Karena transformasi dari nilai-nilai sekuler Barat menuju tatanan islami hanya dapat dilakukan melalui penghayatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai al-Qur'an. Model penerapannya dapat berupa ketegasan, penentangan, dan bimbingan. Dalam mengupayakan penghayatan nilai-nilai al-Qur'an, membutuhkan ketegasan terutama terhadap aspek larangan Tuhan, atau berupa penentangan dan pengingkaran pengakuan terhadap keesaan. Sedangkan proses bimbingan berlaku dalam rangka mengarahkan masyarakat untuk berbuat sesuai dengan ajaran Tuhan.

Tawaran yang diusulkan di atas adalah untuk mempertahankan nilai-nilai moral islami dari distorsi yang dibawa oleh proses global. Ada satu hal yang perlu digaris bawahi adalah globalisasi dengan segala dampaknya, baik positif maupun negatif yang mempengaruhi kehidupan manusia di belahan dunia. Oleh karena itu mempersiapkan diri dengan memperkuat integritas moral islami yang digali dari ajaran Tuhan menjadi sangat penting.

Urgensi Pendidikan Budi Pekerti dalam Paradigma Pendidikan Modern

Modernisasi dipastikan membawa kemajuan seperti di bidang teknologi, politik, ekonomi, termasuk pendidikan. Di bidang pendidikan, ia tentu akan bercorak sekuler (*secular*) karena diakui atau tidak, realitas sering menunjukkan bahwa orang sering mengidentikkan modernisasi dengan westernisasi. Terlepas dari keliru atau tidaknya pengidentikkan itu, agaknya komunitas Timur perlu berjuang keras untuk "mematahkan" asumsi itu, sehingga proses menuju masyarakat modern adalah hak semua orang dengan prinsip-prinsip progresivitas universal. Dengan demikian modernisasi sesungguhnya bukan hanya milik komunitas Barat (*western community*).

Secara filosofis, masyarakat Barat dengan budaya dan kultur liberalnya mereka membangun konsep kehidupan yang didasarkan pada pandangan empirik-pragmatis-sekuleristik. Ajaran agama dan nilai-nilai spiritual menjadi tidak terlalu dipentingkan dalam kaitan dengan penataan berbagai dimensi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, masyarakat yang meyakini kebenaran ajaran Islam, tentu tidak bisa terlalu berharap banyak dengan paradigma pendidikan modern yang ditawarkan Barat melalui corong globalisasi. Kekhawatiran itu terutama terletak pada aspek moral, karena jika dipandang dari sisi moralitas, maka modernisasi akan menjadi malapetaka (Lubis: 1995: 6). Dalam kaitan ini, pendidikan Islam dengan muatan moralnya yang lebih menekankan pada kehalusan budi pekerti manusia merupakan pilihan terbaik untuk mengantisipasi dampak pendidikan modern Barat yang sekuler.

Meskipun demikian, secara jujur juga harus diakui betapa paradigma pendidikan Islam perlu mendapatkan sentuhan yang lebih *qur'ani*, mengingat dalam beberapa kurun waktu yang sangat lama, pelaksanaan pendidikan Islam dianggap masih kurang berperan dalam mencerdaskan umat, khususnya dalam kaitannya dengan keutuhan pandangan dalam melihat khazanah ilmu Tuhan. Dengan kata lain, kaum muslim sesungguhnya diam-diam masih bingung untuk memahami terma sekitar pendidikan Islam itu sendiri. Diskursus selanjutnya yang berkembang adalah tawaran-tawaran parsial dan *ad-hoc* mengenai konsep pendidikan Islam yang merupakan hasil interpretasi dari masing-masing kelompok. Berdasarkan interpretasi itu lalu muncul corak pengajaran Islam yang hanya menekankan salah satu dari aspek khazanah Islam (*fiqh oriented*), yang diklaim sebagai *performance* dari

institusi pendidikan Islam. Bahkan yang lebih ironis adalah bahwa formulasi pendidikan yang mereka pahami adalah satu-satunya yang paling benar dan representasi Islam. Padahal *out put* yang akan dihasilkan oleh pelembagaan dan sistem pengajaran seperti itu hanya akan melanggengkan kepicikan kaum muslim dalam melihat realitas.

Secara mendasar, yang harus diinternalisasikan kaum muslim bahwa Islam secara konseptual-filosofis tidak mengenal dikotomi atau dualisme pendidikan. Sebab menurut Islam semua disiplin—termasuk sains dan teknologi—dapat didekati dengan nuansa keilahian, tanpa memisahkannya dengan klaim ilmu Islam dan non Islam. Akan tetapi memang sangat urgen untuk mencermati sisi moralitas dalam pendidikan Islam. Terlepas dari problem mengenai apa makna dari terma pendidikan Islam, yang perlu dipahami dengan pasti bahwa pendidikan Islam harus mampu menempati posisi sentralnya dalam upaya mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam yang kaya dengan nuansa akhlak untuk dipraktikkan dalam kehidupan secara pribadi dan sosial. Artinya, pendidikan Islam sangat berkepentingan mensosialisasikan nilai-nilai iman berupa semangat moral ke dalam lubuk hati peserta didik supaya memiliki komitmen religius dalam mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan (*skill*) dalam berbagai disiplin. Gagasan inilah yang ingin dikembangkan dengan slogan *islamization of knowledge* yang ditindaklanjuti dari beberapa konferensi dunia tentang pendidikan Islam.

Islamisasi pengetahuan harus dipahami sebagai proses untuk memformulasikan dan menata konsep pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam yang tidak mengenal titik final, karena perubahan masyarakat selalu bergerak ke bandul yang lebih progressif. Dengan demikian, penampilan pelaksanaan pendidikan Islam saat ini akan berbeda secara formalitas dengan penampilan pendidikan Islam di masa akan datang, tetapi dengan prinsip, semangat, dan nilai-nilai dasar Islam yang autentik.

Pendidikan Islam dengan nuansa moral diharapkan mampu atau paling tidak memenuhi harapan-harapan berikut. *Pertama*, pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai agama kepada anak didik dan membimbing peran sosialnya untuk membendung nilai-nilai budaya luar yang mengarah kepada dehumanisasi. *Kedua*, pendidikan Islam idealnya mampu memberikan pemahaman terhadap ide pengintegrasian antara budaya agamis

dan budaya duniawi. *Ketiga*, pendidikan Islam hendaknya mampu menjadikan tauhid sebagai titik tumpu dari suatu wawasan yang mengintegrasikan pengetahuan umum dan agama. *Keempat*, pendidikan Islam harus mampu menjadi pilar dari perkembangan dan perubahan sosial. *Kelima*, pendidikan Islam hendaknya tidak memandang berbeda antara ilmu agama (*religious sciences*) dan ilmu umum (*secular sciences*). *Keenam*, pendidikan Islam harus mengarahkan peserta didik untuk memiliki etos kerja yang tangguh berdasarkan semangat keimanan.

Dengan demikian diharapkan pendidikan Islam dengan perangkat nuansa akhlak dan budi pekerti dapat merupakan transformasi nilai dalam kerangka mengubah perilaku dan pandangan anak didik, sehingga memunculkan komitmen untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ilahiyah ke dalam perilaku sehari-hari. Karena sikap batin dan perilaku yang mengacu kepada nilai-nilai absolutisme itulah yang mampu membentengi nilai-nilai budaya sekuler. Dalam memformulasikan urgensi akhlak dalam pendidikan Islam dalam kaitannya dengan kemungkinan maraknya dekadensi moral sebagai dampak dari globalisasi, Lubis (1995: 7) mengemukakan pandangan sebagai berikut. *Pertama*, pendidikan Islam hendaknya dimulai dengan pandangan yang positif tentang manusia. *Kedua*, demi tegaknya integritas akhlak pada anak didik, hendaknya orang tua di rumah selalu menanamkan perasaan optimis pada anak-anaknya. *Ketiga*, orang tua semestinya dapat membangun citranya sebagai model dan panutan anak-anaknya, termasuk guru. *Keempat*, guru dan orang tua hendaknya dapat bersikap bijaksana dan membimbing dengan hikmah sebagaimana Nabi Muhammad membimbing umatnya. *Kelima*, dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada anak didik, orang tua dan guru tidak hanya menerapkan sederetan daftar larangan, tetapi memberi "kebebasan" mereka untuk berkreaitivitas dengan arahan dan bimbingan yang kondusif bagi berkembangnya daya nalar anak. *Keenam*, pendidikan Islam dengan aspek akhlaknya dapat dirumuskan dengan luwes untuk mengimbangi perubahan zaman, tetapi dengan prinsip dan nilai-nilai dasar yang jelas.

Tawaran di atas tentu masih dalam kerangka memperjelas substansi dan nuansa pendidikan Islam, terutama pada aspek moralitas. Sebab tawaran untuk mengembangkan aspek pendidikan moral dan budi pekerti ini, juga muncul dari beberapa pemikir Barat. Beryamin misalnya, seperti

dikutip Nggandi Katu (1994: 91-92) mengemukakan bahwa konsep pendidikan masa depan harus dapat menjadikan anak didik agar lebih aktif serta memiliki pengalaman di dunia nyata, di samping mampu berpikir kritis. Pelajar juga perlu diarahkan agar menjadi manusia utuh, yaitu tidak hanya dalam arti kognitif, tetapi juga sikap dan nilai kepribadian (*personality*). Memasukkan aspek kepribadian dalam bidang yang ingin dikembangkan dalam paradigma pendidikan masa depan, memberikan harapan bahwa dimensi akhlak dalam pendidikan Islam sangat relevan untuk dikembangkan pada masyarakat dunia modern di masa depan. Pernyataan itu paling tidak memperkuat anggapan bahwa pribadi yang memiliki budi pekerti dan kualitas moral betul-betul menjadi tujuan dari suatu proses pendidikan. Bahkan tujuan pendidikan Islam dengan jelas menghendaki agar individu memiliki keluhuran budi serta memiliki penghayatan dan pengamalan tauhid (Husein: 1994: 61).

Dalam kaitan dengan wacana di atas, Mulkan (1994: 236) menegaskan bahwa dalam kondisi menghadapi tantangan modernitas dengan segala bentuk tampilan "keajaiban" teknologi dan dampak negatifnya, serta tuntutan etik dan moralitas pendidikan Islam, maka hal yang paling mungkin diupayakan adalah mengembangkan pendidikan Islam di atas sistem yang integral dan komprehensif. Pendekatan etik dalam pendidikan Islam yang ditempuh melalui pengembangan intelektualitas secara demokratis dan dialogis akan menumbuhkan kekuatan mental dan kesadaran spiritual. Karena melalui penguatan basis kesadaran moral ini manusia dapat menjadi *istiqamah* dan menemukan solusi terhadap persoalan kehidupan. Realitas tentang urgensi dimensi moralitas ini dalam perbincangan ilmiah sangat beralasan terutama dengan diakuinya adanya kecerdasan emosi (*emotional intelligence*) dan kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*). Unsur tersebut, menurut Danah Djohar & Marshall (2000), merupakan penentu keberhasilan seseorang dalam kehidupan di samping kecerdasan intelektual (Goleman: 1999).

Hasil penelitian Goleman dan paparan Djohar tentang eksistensi kekuatan emosi dan spiritual ini agaknya semakin mengukuhkan konsep pendidikan Islam yang sangat mengaggap pendidikan pendidikan kejiwaan, moralitas, perilaku, budi pekerti, dan seterusnya, sebagai dimensi yang harus ditanamkan dan dikembangkan dengan seksama. Persoalannya adalah

bagaimana semua pranata sosial, sekolah dan keluarga dapat secara sinergis menggarap sistem pendidikan moral dan budi pekerti ini menjadi sebuah realitas yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang kental kultur agamarnya, seperti di Indonesia.

Sosialisasi Pendidikan Budi Pekerti dan Nilai-nilai Moralitas di Keluarga, Sekolah dan Masyarakat

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang hidup dalam ikatan perkawinan, beserta anak-anak di bawah umur yang diakui oleh masyarakat (Kaelany: 1992: 130). Sebagai unit dalam masyarakat, keluarga mempunyai beberapa fungsi yang berhubungan dengan terbentuknya sistem dalam masyarakat. Menurut Wangsanegara seperti dikutip Abu Ahmadi (1990: 91-94), keluarga sekurang-kurangnya harus menjalankan fungsi sebagai berikut. *Pertama*, sebagai pembentuk kepribadian. Orang tua dalam keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis dalam membentuk kepribadian yang kuat dalam diri anak-anak. *Kedua*, keluarga sebagai alat reproduksi kepribadian yang berakar pada etika, budi pekerti, estetika, moral keagamaan, dan kebudayaan yang berkorelasi fungsional dengan sebuah struktur di masyarakat tertentu. *Ketiga*, keluarga berfungsi sebagai perantara dalam proses pemindahan kebudayaan. Maksudnya, sebagai sebuah struktur terkecil, keluarga dapat mentransmisikan nilai-nilai yang dapat menciptakan nuansa lain sehingga bisa mempunyai suasana baru dan berkembang dalam mewujudkan keluarga modern dan berkualitas. *Keempat*, keluarga sebagai lembaga perkumpulan perekonomian. Dalam konteks ini, secara tradisional gerakan ekonomi sering mempertimbangkan unsur kekeluargaan dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan untuk saling membantu sesama keluarga akan semakin lebih transparan. *Kelima*, keluarga berfungsi sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan.

Mencermati fungsi keluarga seperti yang dikemukakan di atas, khususnya mengenai fungsi sebagai "lembaga" pembentukan dan pengasuhan atau pendidikan, maka sangat mendasar sekali apabila keluarga mengambil posisi yang pertama dalam menyiapkan generasi penerusnya. Karena kenyataannya, menurut Ulwan (tt: 212), penyimpangan moral anak lebih sering diakibatkan kelalaian orang tua di rumah dalam mengontrol

pergaulan dan pendidikan anak dalam keluarga. Kelalaian itu berupa tindakan membiarkan anak bergaul dengan teman yang berperilaku buruk, memperkenankan anak menonton film yang bermuatan porno, menyediakan fasilitas bagi anak-anak sehingga memudahkan mereka mendapatkan program acara yang bisa merusak mental dan mempengaruhi tingkah laku mereka terhadap yang memiliki pengaruh negatif, kurangnya kontrol orang tua terhadap literatur dan bacaan anak seperti majalah dan cara berbusana, sehingga anak termotivasi untuk bersikap seperti yang ia baca dan ia lihat secara liberal.

Bertolak dari kelalaian kontrol orang tua, perilaku anak akan memungkinkan terjadinya penyimpangan moral. Untuk itu perlu ditegaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya. *Pertama*, orang tua harus senantiasa membiasakan anak mengingat (*zikr*) kebesaran Tuhan dan nikmat-Nya. Menumbuh kembangkan semangat untuk selalu ingin mencari dalil dan bukti keesaan Tuhan, sehingga proses itu menjadi watak kepribadiannya, yakni selalu mengingat Tuhan dan merasakan kehadiran Yang Maha Hadir dalam dirinya. *Kedua*, orang tua harus membiasakan anak untuk mewaspadaai penyimpangan-penyimpangan yang akan membias pada tingkah laku negatif, seperti selektif dalam menyajikan tontonan dan bacaan untuk anak-anak (Ulwan: 212). Tawaran Ulwan ini tampaknya merupakan realisasi anjuran al-Qur'an. Upaya penanaman ajaran tauhid (*unity of God*) merupakan dasar pendidikan yang harus diimplementasikan dalam pengajaran Islam (QS. Luqman: 13).

Keluarga memang memiliki otoritas yang tinggi untuk mensosialisasikan nilai-nilai budi pekerti. Dalam kerangka tersebut, adagium bahwa surga (kenikmatan hakiki) berada "di bawah telapak kaki ibu", pada dasarnya harus dipahami secara aktif. Artinya, tindakan seorang ibu (orang tua) akan sangat menentukan apakah si anak akan mencapai kebahagiaan atau tidak (Madjid: 1996: 116). Secara implisit pernyataan tersebut akan menyiratkan pemahaman bahwa orang tua punya andil besar dalam memberikan contoh yang dapat ditiru anak. Dalam hal ini setiap didikan yang diajarkan orang tua akan ditasti oleh anak. Orang tua berfungsi sebagai pembimbing. Dengan demikian, sangat tepat anggapan bahwa keluarga merupakan benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui pendidikan Islam.

Dalam hubungan ini an-Nahlawi (1995: 139-144) menegaskan lima tujuan terpenting dari pembentukan keluarga. *Pertama* untuk menegakkan syari'at Allah menyangkut seluruh dimensi kehidupan. *Kedua*, untuk menciptakan suasana tenang dan tenteram baik secara psikologis di antara anggota keluarga, maupun secara sosiologis sesama anggota masyarakat. *Ketiga*, untuk mewujudkan dan mempraktikkan tradisi Nabi dengan melahirkan serta memelihara anak-anak keturunan, sehingga menjadi insan saleh yang pada gilirannya akan menjadi pembimbing dan pengayom umat dengan kelembutan budi pekertinya. *Keempat*, untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang anak. *Kelima*, tujuan pembentukan keluarga adalah untuk menjaga fitrah agar anak tidak melakukan tindakan menyimpang.

Di samping keluarga terdapat sebuah institusi formal yang juga berfungsi sebagai lembaga pembentukan karakter manusia, yakni sekolah. Sekolah sebagai sebuah institusi formal memiliki karakter yang berbeda dari lembaga keluarga. Keluarga tidak mempunyai aturan dan ketentuan khas yang baku dan formal dalam proses pemindahan nilai, sedangkan sekolah memiliki aturan dan ketentuan yang formal tentang bagaimana proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah memiliki kurikulum, jenjang dan tingkatan kelas secara formal.

Menurut Zamroni (1993: 113), ada dua alternatif pendekatan terhadap proses pendidikan persekolahan. *Pertama*, pendekatan *microcosmos*, yaitu memandang sekolah sebagai suatu institusi yang mandiri dan utuh. Segenap civitas akademika pada lembaga tersebut berinteraksi sedemikian rupa sehingga dapat dipandang bahwa sekolah sebagai masyarakat kecil yang terpisah dari masyarakat dan keluarga. *Kedua*, pendekatan *macrocosmos*, yaitu memandang sekolah dengan sistemnya tidak bisa dipisahkan dari lembaga lain di luarnya. Sehingga dalam konteks ini lembaga persekolahan integral dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat besar.

Memahami kedua pendekatan ini dan menyadari bahwa sosialisasi nilai akhlak adalah tanggungjawab semua pihak, maka agaknya perlu meletakkan kerangka berpikir bahwa sekolah berkaitan erat dengan keluarga dan masyarakat secara kultural. Sebab pemahaman dan pengajaran di lingkungan keluarga perlu didukung oleh pengajaran di sekolah serta diakui dalam masyarakat. Dalam hal ini, sekolah memperkuat proses sosialisasi nilai yang telah diterapkan di rumah dan masyarakat, atau bisa sebaliknya. Pola

sinergis di atas akan semakin terlihat dengan memahami beberapa fungsi fundamental yang terdapat pada lembaga sekolah. *Pertama*, sekolah berfungsi sebagai penyederhanaan dan penyimpulan. Fungsi ini menghendaki agar lembaga sekolah bisa menyajikan informasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam upaya menjelaskan fenomena dan hubungan sosial yang rumit di masyarakat, sehingga siswa dapat memahami dengan jernih setiap persoalan masyarakat tanpa perasaan takut, silau, gamang dan kekaguman yang berlebihan. *Kedua*, fungsi sekolah sebagai penyucian dan pembersihan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan idealnya dapat berfungsi menjernihkan penyimpangan dari konsep yang telah diajarkan sejak generasi sebelumnya agar tidak terjebak dalam konsep "bid'ah" dan kebohongan ilmiah. *Ketiga*, sekolah berfungsi untuk memperluas wawasan dan pengalaman anak didik melalui transferisasi tradisi. Dalam konteks ini, lembaga sekolah harus mampu mengambil manfaat dari penguasaan tradisi lama dalam kerangka memformulasikan tradisi baru sebagai buah dari tradisi sebelumnya.

Masih dalam diskursus di atas, menurut Kaswardi (200: 75), ada tiga model pendekatan pengajaran yang biasa dikembangkan. *Pertama*, model pewarisan melalui pengajaran atau bersifat indoktrinasi. *Kedua*, model pengembangan kesadaran nilai yang membiarkan anak terlibat aktif dalam pengalaman penghayatan suatu nilai sampai ia mencapai penerangan nilai (*value clarification*). *Ketiga*, model pengembangan nilai *etika swatata*, yakni memperhatikan tahap perkembangan kejiwaan anak secara individual dalam pemberian pemahaman suatu nilai. Ketiga model pendekatan di atas secara umum sebenarnya telah diterapkan di lembaga sekolah dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Betapa pada tingkat sekolah rendah pengajaran dengan indoktrinasi dapat dirasakan dengan jelas—meskipun pola ini perlu dievaluasi—di mana anak didik tidak ada pilihan lain kecuali mendengar dan mengangguk. Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi pendekatan pengajaran peserta didik diberi kebebasan untuk terlibat secara sadar dalam penghayatan suatu nilai.

Dalam kaitan dengan penghayatan nilai ini, dianggap penting untuk memperbincangkan peran sosial masyarakat dalam mensosialisasikan nilai-nilai akhlak dan prilaku moralis kepada masyarakat umumnya, termasuk anak didik yang merupakan bagian dari masyarakat. Secara sosiologis, dalam

semua sistem kemasyarakatan selalu terjadi interaksi antar individu atau hubungan antar kelompok (Soekanto, 1991: 478). Dalam konteks ini, manusia sebagai individu yang dinamis bersifat kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat pembagian kerja, saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu dari tradisi dan sistem. Anggota masyarakat mesti dilibatkan secara signifikan dalam proses penanaman nilai-nilai moral. Menurut Jalaluddin dan Said (1994: 102), upaya pembentukan hubungan sosial yang mengandung nilai-nilai akhlak dalam pergaulan masyarakat, dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. *Pertama*, melatih diri untuk tidak berbuat tercela, misalnya menipu, menjadi rentenir, makan harta anak yatim, dan menyakiti sesama anggota masyarakat, dan seterusnya. *Kedua*, memperkokoh hubungan kerjasama dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan yang mengarah pada sikap pembelaan terhadap kejahatan, seperti bersaksi palsu, berkhianat, serta mengisolasi diri dari masyarakat, dan seterusnya. *Ketiga*, menggalakkan perbuatan terpuji, misalnya suka memaafkan kesalahan orang lain, bersikap simpati terhadap orang miskin, dan seterusnya. Keempat, selalu membina hubungan menurut tata tertib, seperti berlaku sopan, menebar salam, dan seterusnya.

Amsyari (1995: 175) dengan tegas mengatakan bahwa penyebab dari segala penyimpangan perilaku dan buruknya budi pekerti masyarakat kita adalah karena pola pembangunan bangsa yang mengabaikan pembinaan akhlak dan justru mengagungkan pertumbuhan ekonomi, serta lemahnya wawasan sosial dari para pemimpin negeri ini, di samping kuatnya tekanan peradaban Barat ke dalam kehidupan sosial bangsa. Oleh sebab itu, semua unsur di masyarakat yang meliputi rakyat biasa, ulama, pejabat pemerintah, angkatan bersenjata, dan lain sebagainya segera bertindak secara tegas menyelamatkan kehidupan sosial bangsa ini. Karena keunggulan masa depan bangsa dan generasi yang akan datang terletak pada suatu masyarakat yang maju, utuh dan universal dalam pengertian bahwa di dalamnya semua nilai-nilai moralitas spiritual akan terejawantahkan (Muthahari: 1990: 50).

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa perbincangan sekitar wacana pendidikan dan pengajaran budi pekerti dalam sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam menjadi penting Hubungan sinergis

antara keluarga, sekolah dan masyarakat dalam membangun masyarakat etika adalah sebuah keniscayaan. Tanpa upaya pencermatan yang sinergis ini bisa dipastikan cita-cita membangun basis pendidikan moral, budi pekerti, dan akhlak menjadi tidak bermakna (*meaningless*) dan cenderung parsial (*ad-hoc*).

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Ahmadi, Abu. 1990. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ahmed, Akbar S. 1993. *Postmodernisme: Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, terj. M. Sirozi, Bandung: Mizan.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1996. "Agama dan Nilai-Nilai Modern", dalam *Majalah Ummat*, Nomor 13 Tahun II, tanggal 23 Desember 1996.

Alisyahbana, Sutan Takdir. 1992. *Pemikiran Islam dalam Menghadapi Globalisasi dan Masa Depan Umat Manusia*, Jakarta: Dian Rakyat.

Amsyari, Fuad. 1995. *Islam Kaafah: Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

An-Nahlawi, Abdurrahman. 1995. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, terj. Shihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press.

Arifin, Syamsul. 1996. *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*. Yogyakarta: Sypress.

Golleman, Daniel. 1999. *Emotional Intelligence*. Jakarta: Gramedia.

Hussien, Syed Sajjad. 1994. *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Gema Insani Press.

Jalaluddin dan Usman Said. 1994. *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, Jakarta: Rajawali Press.

Kaelary. 1992. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Karim, M. Rusli. 1993. *Umat Islam di Abad ke-21*, Yogyakarta: Sypress.

Kaswardi. 1993. *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, Jakarta: Grasindo.

Lubis, Ridwan. 1995. "Pengaruh Dimensi Budaya dalam Pengembangan Pendidikan Islam Kaitannya dengan Dekadensi Moral Generasi

- Muda", *Makalah Seminar Nasional*, Palembang: IAIN Raden Fatah, tanggal 20-21 Oktober 1995.
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- _____. 1996. *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Muhaimin dan Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung: Trigenda Karya.
- Muhaimin. 1989. *Problematika Agama dalam Kehidupan*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mulkan, Abdul Munir. 1994. *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*. Yogyakarta: Sipsess.
- Muthhari, Murthada. 1990. *Masyarakat dan Sejarah*. terj. Hashem, Bandung: Mizan.
- Naisbitt, John. 1994. *Global Paradox*. terj. FX. Budijanto, Jakarta: Binarupa.
- _____, dan Patricia Aburdene. 1990. *Megatrend 2000*. terj. FX. Budijanto, Jakarta: Binarupa.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Katu, Nggandi. 1994. *Jangan Tangisi Tradisi: Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Percievel, Fred. 1988. *Teknologi Pendidikan*. terj. Sujarwo, Jakarta: Erlangga.
- Salim, Emil. 1987. *Membangun Manusia Seutuhnya*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Shari'ati, Ali. 1994. *Membangun Masa Depan Islam*. terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soejono. 1991. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ulwan, Abdullah Nashih. tt. *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. terj. Syafullah K., Bandung: Asy-Syifa.
- Zamroni. 1993. *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM-NU.